

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.
- Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1987.
- , *Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu*. Cetakan ke-8. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Gitacahyani, Azizah Rima dkk. *Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Deposisi, Vol. 1, No. 4, 2023. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1802>.
- Hakim, Taufiqul. *At-Taufiq: Kamus Arab-Jawa-Indonesia*. Jepara: El-Falah Offset, 2004.
- Halim dan Hadiati, “Analisis Terhadap Pengajuan Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Karena Perwalian Yang Tidak Sah Pada Perkara Putusan Nomor 1097/PDT.G/2020/PA.JT.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (16 Juni 2023): 1404–14.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: CV Zahir Trading, 1975.
- Herawati, Ervina Martha dkk. “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia.” *Socius* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10213731>.
- Indarti, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Intihani, Siti Nur. “Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.” *Jurisdictie* 5, no. 1 (2020): 45–46. <https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/168>.
- I Putu Ardika Saputra, Andika Natalio, Sandika Dello Primastia, Nobri Novan Harun, Andareksa, Anwar Noor Harimurti, Nuraliah Ali, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Campuran” 02, no. 02 (September 2022), <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.572> 1.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.

Kisworo, Rosa dan Dona Budi Kharisma. "Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2 Februari 2019): 43–48. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30096>.

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

Laurensius Mamahit. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 15–16.

Maulinda dkk. "Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Campuran dan Status Anak Luar Kawin Studi Kasus Jesika Iskandar." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2023): 127–134.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.

Nurani, Sifa Mulya dan Septiayu Restu Wulandari. "Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (30 November 2022): 176–192. <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1532>.

Pengadilan Agama Kediri. "Profil Pengadilan." Diakses 23 Juni 2025. <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

-----, "Tugas Pokok dan Fungsi." Diakses 23 Juni 2025. <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Juz 7, Beirut: Dar al- Fikr.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Renti Friska Pangaribuan dan Winda Fitri, "Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia Dan Warga Belanda)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.5296>.

Romdona, Silvia Senja Siti, dan Ahmad Gunawan. *Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner*. Vol. 3, t.t.

Sa'adah, Hj. Nur, Hj. Sri Siti Munalar, Surya Oktarina, Halimah Humayrah Tuanaya, dan Ervianto Braviaji. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. (2024).

Sabiq, Sayyed. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Daarul Al-Fikr, 1983. Cet. ke-37.

Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Selviyanti. "Pengajuan Pembatalan Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam Masa Iddah Hamil." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2020).

Septiyani, Ismi Tri. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (22 Desember 2022): 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Sugeng. *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Sunaryati Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Binacipta, 1976.

Taufiqul, Hakim. *At-Taufiq: Kamus Arab-Jawa-Indonesia*. Jepara: El-Falah Offset, 2004.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*, Article 16(1), 1948. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

Wizara Hal-Auqaf wa As-Syu'un al-Islamiyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar As-Salasil, 1404 H–1427 H.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cetakan ke-, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2022.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, t.t., Juz 4, hlm. 3153.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri No.00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr., Tahun 2020.

Wawancara

Harun JP. Wawancara, Pengadilan Agama Kota Kediri, 12 Juni 2025.

Sumber Web Pemerintah

“Kedudukan dan Keprotokolan Pengadilan Agama – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” Juni 2020, diakses 26 Juni 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-dan-keprotokolan-pengadilan-agama-oleh-dr-mahmud-hadi-riyanto-6-2>.

